

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I. W. (2013). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 1 (1), 1-10.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa. (2012-2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012-2017.
- Bokingo, A. (2017). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boul). *Jurnal Katalogis* , 5 (12), 43-54.
- Detiksumsel. (2018, September 14). *Efen Permata*. Retrieved from <https://www.detiksumsel.com/bpk-temukan-5-permasalahan-di-palembang/>
- Febrianti, S. (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen* , 10 (1), 151-171.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS Edisi ke-8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imbiri, J. (2018). Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset* , 1 (2), 34-62.
- Klikanggaran. (2018, April 27). *Tim Berita*. Retrieved from <https://klikanggaran.com/anggaran/walikota-palembang-ke-manamilyaran-aset-tidak-diketahui-keberadaannya.html>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nur Shabrina, K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntailitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* , 2 (1), 1-9.
- Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Padang.
- Priyatno, D. (2018). *SPSS Panduan Mudah Olah Data Bagi Mahasiswa&Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Simamora, F. M. (2011). Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Selatan. Medan
- Sugiama, A. G. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata* . Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan R&D*. Bandung: Alfabeta.